

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abubakar, Rifa'i, M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKAPress, Yogyakarta, 2021.
- Ambarwati, Arum Rikno. *Pengelolaan Dana Desa*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022.
- Hadi, Badiul. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Penerbit Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak), Jakarta Pusat, 2020.
- Hanafi, H. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2016.
- Raharjo, Muhamad Muiz. *Pengelolaan Dana Desa*. PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press, Jakarta, 2018

### 2. Jurnal Ilmiah

- Adlini, Miza Nina, Siti Namirah, Tara Wardana, Wanda Syafitri, Weyni Iskandaria, dan Yuli Eprianna Harahap. *Haura Utama*, 2022.
- admin ppip. "Indikator Keterbukaan Informasi Publik." *ppid.garutkab.go.id*. Last modified 2023. Diakses Januari 21, 2024. [https://ppid.garutkab.go.id/informasi\\_publik/indikator-keterbukaan-informasi-publik](https://ppid.garutkab.go.id/informasi_publik/indikator-keterbukaan-informasi-publik).
- Akhmaddhian, Suwari. "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 09, no. 1 (2018): 30–38.
- Astuti, Indri, S Pd, dan Sejarah Artikel. "5384-11408-1-Sm" 41, no. 2 (2014): 169–183.
- Azas, Pelaksanaan, Keterbukaan Dana, Desa Di, No Tahun, dan Tentang Desa. "Muandau Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memproleh Gelar Serjana di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Disusun Oleh : Nama : Nazri Akir Fakultas Hukum Pekanbaru Tahun 2020," no. 6 (2020).
- Betan, Nur Asia Usman, dan Paskah Ika Nugroho. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Penelitian Dan*

*Pengembangan Sains Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 133–139.

Gandari, Aulia Putri, dan Purwono Sungkono Raharjo. “Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Sovereignty* 1, no. 3 (2022): 396–402.

Ghozali, Rosalina. “Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat).” *Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 2, no. 2 (2018): 237.

Harahap, Athika Salsabilla, dan Febby Mutiara Nelson. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan.” *Simbur Cahaya* 30, no. 1 (2023): 133–155.

Huzaeni, Mohamad Roky, dan Wildan Rofikil Anwar. “Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 2 (2021): 213–230.

Ichwan, Saiful. “Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 81.

Kadir, Yusrianto, dan Roy Marthen Moonti. “Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa.” *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430–442.

Lamusu, Ruly, dan Dian Ekawaty Ismail. “Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa.” *Philosophia Law Review* 1, no. 1 (2021): 22–38.

Lili, Marselina Ara. “Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar.” *Jurnal Ekonomi Daerah (Jeda)* 7, no. 1 (2018).

Lituhayu, Dyah. “Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa.” *Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2019): 17–25.

Misriani, Dita, Risprawati Risprawati, Bagdawansyah Alqadri, dan Yuliatin Yuliatin. “Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2238–2243.

Nurani, Siti Syahida. “Kontruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Yang Berperspektif Transendental.” *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018.

Nurjaman, Dirman. “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan

- Undang-Undang Omnibus Law.” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (2021): 57–69.
- Pahlevi, Farida. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen.” *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).
- Pitoy, Frances Esther Vaticanaq. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016).
- Pitriyah, Pitriyah, dan Rani Apriani. “Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1189–1195.
- Rokilah, Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law.” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22.
- Rudiarta, I Ketut Gede, I Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani. “Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemerintahan desa.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 63–67.
- Salsabilla, Athika, dan Febby Mutiara. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , United Kingdom dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan ( PBB ), yaitu dalam United Nation Convention Against Corruption ( UNCAC ) yang telah” XXX, no. 1 (2023): 132–155.
- Sipayung, Sonia Christy, dan R Rahaditya. “Analisis Penerapan Pasal 14 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Pasal 45a Ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong Di Media S” 4, no. 1 (2021): 4325–4344.
- Sugiman. “Pemerintah Desa.” *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.
- Tarawatu, Inneke Wuda. “Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Perpustakaan Nasional*, 2017.
- Wasik, Moh. “Implementasi Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”

(n.d.).

Widayanti, Nurma. “ipak-2021,” n.d.

Yondaningtiyastuti, Septy. “Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi* 4, no. 3 (2022): 177–190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622/648>.

### 3. Internet

Sugiarto, Agus. “diduga Tilep Dana Bantuan Sosial Warganya, Oknum Aparat Desa Sukadana, Kuningan Dijebloskan ke Penjara.” *radar kuningan.com*. Last modified 2023. Diakses Januari 20, 2024. <https://radarkuningan.disway.id/read/652877/diduga-tilep-danabantuan-sosial-warganya-oknum-aparat-desa-sukadana-kuningan-dijebloskan-ke-penjara>.

### 4. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun Anggaran 2023  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang  
Pengelolaan Dana Desa